

BAB IV

Diplomasi Ekonomi Jepang Terhadap Indonesia Yang dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency

JICA di Indonesia yang berdiri pada tahun 1969, merupakan kantor cabang JICA yang pertama dan terbesar dibandingkan dengan lebih dan 70 kantor cabang JICA yang ada di seluruh dunia.⁶² Indonesia merupakan salah satu negara penerima bantuan hibah bilateral Jepang terbesar berdasarkan besaran jumlah dana yang telah disalurkan secara kumulatif sampai TA Jepang 2007 dimana telah terkirim 35.630 peserta Indonesia untuk mengikuti program pelatihan di Jepang dan 11.108 tenaga ahli Jepang telah ditugaskan di Indonesia. Dalam merealisasikan bantuannya untuk Indonesia.⁶³

A. Profil Japan International Cooperation Agency

Globalisasi yang cepat dan tantangan-tantangan baru, khususnya kondisi krisis keuangan dan perubahan iklim, telah menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam ekonomi politik baik di dunia negara berkembang maupun komunitas donor internasional.

Sejak pembentukannya pada 1974, Badan Kerjasama Internasional Jepang, yang dikenal dengan JICA (*Japan International Cooperation Agency*) telah membangun berbagai bentuk kerjasama teknik di lebih dari 150 negara dan

⁶² Japan International Cooperation Agency. <http://www.binapenta.go.id/mod.php?i=86>. Diakses 28 Agustus 2013.

⁶³ *Gildhalisa*. Peran Japan International Cooperation Agency (JICA) Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Di Indonesia Melalui Climate Change Program Loan (Ccpl) 2007-2010. Diakses dari elib.unikom.ac.id/download.php?id=143144. Diakses 1 Agustus 2013.

wilayah. Seiring dengan berjalannya waktu, peranan JICA pun telah berubah.⁶⁴ Kini JICA lebih berorientasi pada lapangan, bekerja lebih dekat dengan mitra pemerintah, organisasi donor internasional, perusahaan swasta dan, yang terpenting dari semua itu adalah bekerja sama dengan penduduk serta masyarakat lokal untuk mewujudkan harapan bagi masa depan yang lebih baik.

Pada Oktober 2008, JICA bergabung dengan bagian Operasi Kerjasama Ekonomi Luar Negeri (OECO), sebagai bagian dari organisasi Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional atau dikenal dengan JBIC (*Japan Bank for International Cooperation*).⁶⁵ Kini JICA “baru”, sebagai badan donor bilateral terbesar dunia, dapat memberikan dukungan dalam bentuk Kerjasama Teknik, Pinjaman Bersyarat Lunak dan Bantuan Hibah secara terpadu dan harmonis, untuk berbagai bidang pembangunan, mulai dari proyek infrastruktur hingga proyek ditingkat akar rumput.⁶⁶

Adapun Visi organisasi JICA adalah mewujudkan “Pembangunan yang Inklusif dan Dinamis” untuk mencapai “ketahanan manusia” bagi seluruh masyarakat dunia. JICA telah mencanangkan empat Misi yang dapat dicapai melalui empat pilar Strategi utamanya. Operasional kerjasama JICA akan -misi dilaksanakan berdasarkan Visi dan Misi-Misinya ini. Adapun misi-misi JICA adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Menitikberatkan pada Agenda Global: Menitikberatkan pada agenda global, seperti perubahan iklim, air, pangan, energi, penyakit menular dan keuangan.

⁶⁴ JICA Profile. <http://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/pdf/brochure01.pdf>. Hal. 2. Diakses 28 Agustus 2013.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid. hal. 7

2. Pengentasan Kemiskinan melalui Pertumbuhan yang Berkeadilan: Menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pertumbuhan yang inklusif dan merata.
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: Penguatan kebijakan, institusional, organisasi dan sumber daya manusia (SDM) sebagai pranata atau perangkat dasar pembangunan.
4. Pencapaian Ketahanan Manusia: Melindungi diri manusia dari berbagai ancaman dan membangun masyarakat untuk dapat hidup secara bermartabat.

Jepang mengimpor lebih dari 90% untuk sumber daya alamnya, seperti minyak, gas alam, dan bijih besi, serta 60% untuk pangan. Jepang juga mengeksport banyak produknya ke dunia.⁶⁸ Perdagangannya dengan negara-negara berkembang mencapai 60% dari keseluruhan impornya dan 40% dari eksportnya, sehingga negara-negara tersebut menjadi mitra yang sangat penting bagi Jepang.⁶⁹

Untuk mempererat kemitraan dengan negara-negara berkembang dan memberikan sumbangsih terhadap stabilitas internasional, Jepang telah menyediakan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) bagi negara-negara berkembang selama lebih dari setengah abad. Sebagai organisasi yang berperan dalam menyediakan ODA, JICA telah membantu pengembangan sumber daya manusia (SDM), alih teknologi dan pengembangan infrastruktur di berbagai negara melalui kerjasama teknik, pinjaman ODA dan memberikan bantuan hibah dalam kerangka kerjasama bilateral. Kegiatannya telah mendapat pengakuan yang

⁶⁸ Ibid. hal. 4.

⁶⁹ Ibid.

tinggi atas kesuksesannya dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan di berbagai negara Asia dan di berbagai belahan dunia.

JICA juga telah membangun kerjasama yang erat dengan pemerintah negaranegara industri maju dan organisasi bantuan internasional dalam mencapai MDGs dan mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim.

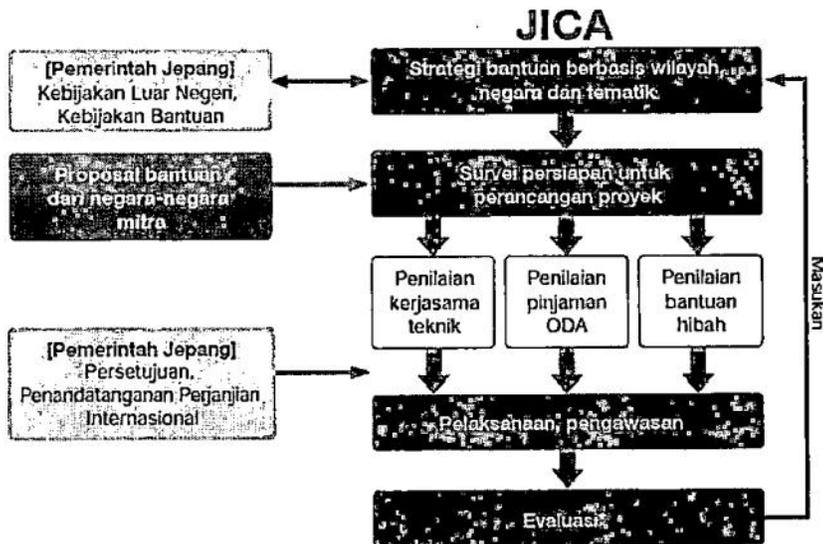
B. Diplomasi Ekonomi Jepang Terhadap Indonesia Yang Dilakukan Oleh Japan International Cooperation Agency

Sejak bergabung dalam *Colombo Plan* pada 1954, Jepang telah memberikan bantuan teknik dan pendanaan bagi negara-negara berkembang melalui ODA, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan kemajuan pembangunan masyarakat internasional yang akhirnya dapat memberikan keamanan dan kemakmuran Jepang. JICA memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh ODA, seperti kerjasama teknik, pinjaman ODA dan bantuan hibah secara terpadu, kecuali kontribusi yang diberikan melalui organisasi internasional. JICA, sebagai badan donor bilateral terbesar di dunia, berada di lebih dari 150 negara dan wilayah serta memiliki sekitar 100 kantor perwakilan di seluruh dunia

JICA berupaya memberikan dukungan secara efisien dan efektif sesuai kebijakan bantuan Pemerintah Jepang, yang dikembangkan dengan menghindari adanya bias dan memiliki perspektif yang lebih luas dari sekedar skema bantuan seperti kerjasama teknik, pinjaman ODA dan bantuan hibah. Pada intinya, JICA secara cepat melakukan perancangan dan pelaksanaan proyek berdasarkan survei

persiapan untuk mempelajari substansi bantuan yang diperlukan di lokasi proyek sebelum menerima proposal bantuan dari negara mitranya.

Gambar 4.1 Alur Operasional JICA dalam Menyediakan Bantuan



Sumber: JICA. <http://www.jica.go.jp/english/operations/evaluation/>

* JICA melakukan evaluasi terhadap proyek-proyeknya dengan menggunakan siklus Rencana-Tindakan-Pemeriksaan-Aksi (*Plan-Do-Check-Act* atau PDCA) untuk setiap skema baik kerjasama teknik, pinjaman ODA maupun bantuan hibah, dan selanjutnya sistem tersebut diterapkan pula untuk memperbaiki mekanisme operasional dan untuk mencapai akuntabilitas publik yang lebih memadai.

Salah satu hal yang menjadi ciri khas dari sistem kebijakan ODA Jepang, ialah bahwa ODA harus dimulai dari pengajuan dan permintaan (request) calon negara penerima ODA Jepang. Kebijakan ini disebut dengan *yosei-shugi*, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem *project-cycle*, yang secara garis besar terdiri dari tahap awal (pengajuan dan formulasi), tahap implementasi, dan tahap evaluasi. *Project-cycle* untuk ODA jenis hibah dan pinjaman pada dasarnya

sama, yang membedakannya hanyalah terletak pada instansi yang menyeleksi dan mengimplementasikannya, serta adanya proses lelang tender untuk mengimplementasikan ODA nantinya, yang terdapat dalam ODA tipe pinjaman. Sedangkan untuk ODA tipe kerja sama teknis tidak ada project-cycle. Hal ini disebabkan karena kerja-sama teknis hanya mengurus bidang pelatihan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan teknis, bukan berupa proyek, seperti tipe ODA lainnya. Oleh karena itu kerja sama teknis bisa dikatakan hanyalah menjadi bagian dari proses project-cycle tersebut, khususnya dalam ODA tipe hibah. Untuk tipe hibah sendiri project-cycle-nya secara sederhana terdiri dari:⁷⁰ Pertama, tahap Application dan Project Design, tahap yang dimulai dengan adanya permintaan dan pengajuan formal dari Negara berkembang kepada pemerintah Jepang, melalui kantor-kantor perwakilannya, seperti kedutaan besar maupun konsulat-konsulat, yang terdapat di Negara tersebut.

Kemudian permintaan tersebut akan diproses dan dikirim ke Tokyo, biasanya oleh personil MoFA, yang terdapat di kantor-kantor perwakilan Jepang. Setelah itu, pengajuan yang ada kemudian diseleksi dengan berbagai pengajuan-pengajuan lainnya. Penyeleksian dilakukan guna melihat pengajuan bantuan manakah yang terlebih dahulu akan diprioritaskan untuk diimplementasikan. Untuk melihat apakah proyek yang diajukan oleh sebuah negara 'layak' atau tidak untuk dibiayai, maka diperlukan semacam studi yang mendalam akan proyek tersebut. Biasanya pemerintah Jepang (diwakili oleh JICA) akan mengirim ahli-ahli (yang terkait dengan bidang proyek yang akan dibantu) untuk melakukan studi lapangan di negara yang mengajukan bantuan tersebut. Dalam studinya

⁷⁰ David Arase (Ed.), *Japan's Foreign Aid: Old continuities and New Directions* (New York: Routledge, 2005), hlm. 152.

tersebut, mereka juga sering kali berkonsultasi dengan pihak-pihak lainnya, seperti personil JICA yang terdapat di negara tersebut dan juga institusi pemerintah negara berkembang yang terkait dengan bidang bantuan tersebut, untuk kasus Indonesia, seperti BAPENAS. Setelah studi berhasil dilakukan maka hasil studi akan kembali didiskusikan oleh pemerintah Jepang (kementrian-kementriannya), mengenai bentuk ODA yang akan disalurkan, dengan pemerintah negara penerima. Dalam tahap ini terjadi pertukaran pendapat dan pikiran, dan bahkan kadangkala terjadi re-formulasi dari desain proyek yang diajukan, dimana terdapat sebagian unsur-unsur yang ada dalam proyek tersebut dinilai tidak cocok dan kemudian dihilangkan. Hasil 'perdebatan' yang keluar merupakan hasil konsensus dan bargaining dari pihak pemberi dengan pihak yang akan menerima. Hasil yang keluar ini kemudian menjadi blue-print dari ODA yang akan diimplementasikan. Masing-masing pihak akan menerima draft rancangan bentuk ODA tersebut.

Kedua, tahap Approval dimana setelah rancangan ODA disetujui, maka akan langsung dimasukkan ke JICA, sebagai bentuk pengajuan untuk meminta bantuan JICA dalam mengimplentasikan rancangan yang telah disepakati. Kementrian-kementrian yang terkait, kemudian turut serta untuk membahas cara pengimplementasian ODA. Setelah disepakati mengenai cara pengimplementasiannya, maka rancangan dari ODA yang ada kemudian akan mendapatkan persetujuan dari kabinet, sebagai bentuk formalitas bahwa pengajuan ODA telah diterima dan disetujui oleh pemerintah Jepang. Ketiga, ialah Implementation yang diawali dengan adanya kesepakatan bilateral antara Jepang dengan negara yang akan menerima ODAny. Kemudian disusul oleh

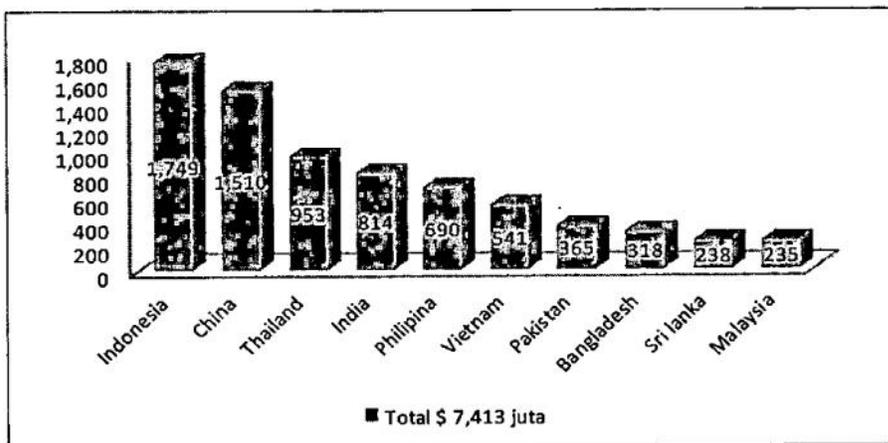
pembahasan mengenai masalah-masalah teknis dalam pengimplementasiannya, seperti kontrak untuk konsultannya, kontrak untuk pembiayannya (bank), serta kontrak yang terkait dengan masalah konstruksinya. Tahap implementasi kemudian diakhiri dengan pembangunan proyek ODA yang diajukan tersebut. Serta, keempat tahap Operation dan Evaluation. Merupakan tahap terakhir, dimana pemerintah Jepang akan melihat apakah proyek ODA yang telah diimplementasikan berjalan dengan semestinya, serta melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan proyek yang ada, apakah menimbulkan dampak negative bagi sekitarnya atau tidak.

Japan International Cooperation Agency (JICA) adalah salah satu organisasi pemerintah Jepang yang mempunyai fungsi utama untuk melakukan kerjasama teknis dengan negara-negara berkembang melalui bantuan hibah (grant assistance).

Kegiatan pemberian bantuan teknis dilakukan Jepang sejak bulan April 1954 melalui keikutsertaan Jepang dalam Colombo Plan (CP). Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya kegiatan ini semakin berkembang dengan bertambahnya beberapa jenis program bantuan dan berdirinya berbagai organisasi yang sejenis di Jepang, termasuk JICA yang berdiri pada tanggal 1 Agustus 1974. Sejak berdiri, JICA telah ikut berpartisipasi membantu upaya pengembangan SDM, sosial dan ekonomi Negara-negara berkembang Asia Tenggara; Asia Timur; Asia Tengah dan Caucasia; Asia Barat; Oceania: Amerika Tengah dan Karibia; Amerika Selatan; Afrika; Timur Tengah dan Eropa. Berdasarkan data tahun 2002 terdapat 152 Negara yang telah melakukan kerjasama teknis dengan Jepang melalui JICA.

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar (bahkan pernah menjadi negara yang terbesar untuk kurun waktu tertentu) penerima ODA Jepang. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia itu sendiri yang sangat vital baik bagi kepentingan geoekonomi maupun kepentingan geopolitik Jepang. Berikut adalah grafik yang memaparkan mengenai jumlah bantuan yang diberikan Jepang kepada Negara-negara di kawasan Asia pada tahun 1998-1999 dimana Indonesia merupakan Negara penerima ODA Jepang terbesar.

Grafik 4.1 Jumlah Bantuan ODA Jepang di Asia Tahun 1998-1999



Sumber: David Arase. *Japan's foreign aid: old continue and new directions*. Routledge. 2005. Hal. 124

Dari grafik yang ada dapat dilihat bahwa jumlah ODA yang disalurkan ke kawasan Asia pada tahun 1998-1999 adalah sebesar 7,423 juta Dollar AS. Dari jumlah ini Indonesia menerima 1,749 juta Dollar AS. Dari jumlah tersebut Indonesia menduduki posisi pertama sebagai penerima ODA Jepang. Disusul oleh China sebesar 1,510 juta Dollar AS, disusul oleh Thailand 953 juta Dollar AS, kemudian oleh India 814 juta Dollar dan disusul oleh Philipina, Vietnam sampai dengan Malaysia di urutan 10 sebesar 235 juta Dollar. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih sangat penting bagi Jepang jika dibandingkan dengan

Negara-negara dikawasan Asia lainnya.

Terdapat sejumlah pendapat yang menjelaskan mengapa Indonesia dianggap 'penting' oleh Jepang, sehingga menjadikan Indonesia sebagai fokus bagi penyaluran ODA Jepang, yakni:⁷¹

1. Indonesia merupakan salah satu negara penerima investasi (FDI) Jepang terbesar. Salah satunya dapat dilihat dari total investasi Jepang di Indonesia antara tahun 1967-1990 dalam sektor non-minyak, yang mencapai 7,9 miliar Dollar AS, mengalahkan investasi AS (tanpa sektor minyak)⁷² sebesar 2 milyar Dollar AS, dan Belanda yang hanya sebesar 1,5 milyar Dollar AS.
2. Jepang merupakan partner dagang terbesar Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impornya. Dari tahun 1940-an sampai dengan tahun 1960-an, Indonesia memiliki ketergantungan-impor dari Jepang, dan ketergantungan ekspor kepada Amerika Serikat. Namun semenjak itu, baik impor dan ekspor Indonesia terganggu pada Jepang.
3. Indonesia merupakan penyedia (supplier) LNG (liquefied natural gas) terbesar bagi Jepang. Selain itu pula, Indonesia pernah menjadi salah satu negara pengekspor minyak Jepang (dengan jumlah yang cukup signifikan).
4. Kekayaan yang melimpah akan sumber daya alamnya, upah tenaga buruhnya yang relatif murah (walaupun sekarang ini disaingi oleh Vietnam), serta ditambah dengan jumlah penduduknya yang padat sebagai sebuah potensi pasar, membuat Indonesia 'menarik' di mata Jepang.

⁷¹ *Gildhalisa*. Ibid. hal 34

⁷² Jika investasi AS dalam sektor minyak juga dimasukkan, maka total investasinya di Indonesia jauh lebih besar ketimbang investasi Jepang itu sendiri.

5. Kepentingan geopolitik Jepang atas wilayah Indonesia, (khususnya pasca krisis minyak), yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Lombok, baik sebagai jalur perdagangan internasional Jepang maupun jalur pengiriman minyak Jepang dari Timur Tengah.⁷³
6. Posisi Indonesia yang dipandang Jepang sebagai ujung tombak ASEAN, yang memiliki potensi ekonomi yang besar, baik dalam bentuk kekayaan alamnya maupun potensi pasarnya, sehingga Indonesia dianggap memiliki peranan yang penting di kawasan ASEAN. Meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia secara khusus, berarti pula turut serta membangun regional ASEAN secara umumnya, dan hal tersebut dipercaya menjadi kunci bagi terciptanya stabilitas politik di kawasan tersebut. Selain itu pula, Indonesia dianggap sebagai 'pintu gerbang' ASEAN, dimana membina hubungan baik dengan Indonesia, berarti pula akan membina hubungan baik dengan kawasan tersebut. Ini semua tentunya merupakan faktor penting bagi kelangsungan kepentingan ekonomi Jepang di kawasan tersebut.

Sekalipun terlihat seperti pemborosan anggaran, namun pemerintah Jepang masih menganggap bahwa ODA baik itu pinjaman, dana hibah dan kerjasama teknik sebagai jalan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi Jepang. Hal ini terkait dengan fungsi ODA, yang selain sebagai bentuk politik citra Jepang, ODA juga digunakan sebagai 'penstimulus' aktivitas ekonomi (industri) Jepang. Dan sesuai

⁷³ Dennis D. Trinidad, "Japan's ODA at The Crossroads: Disbursement Patterns of Japan's Development Assistance To Southeast Asia", dalam *Jurnal Asia Perspective*, Vol. 31, No. 2, 2007, hlm. 115, yang diakses dari http://www.academia.edu/849372/2007._Japans_ODA_at_the_Crossroads_Disbursement_Patterns_of_Japans_Development_Assistance_to_Southeast_Asia. 31 Juli 2013.

dengan tujuan program ODA yaitu untuk mendekatkan Negara-negara penerima donor dengan Jepang, yang akan meningkatkan kepercayaan antara sesama Negara. Kemudian langkah berikutnya lebih mudah bagi Jepang untuk membuka perusahaan di Negara yang telah menerima bantuan.

1. Bantuan Pinjaman (Yen)

Pinjaman Yen merupakan salah satu tipe dalam ODA Jepang. Pinjaman dapat menjadi salah satu indikator apakah hubungan ekonomi sebuah negara dengan Negara lainnya setara atau justru tidak setara. Secara umum, Pinjaman sudah menunjukkan hubungan yang tidak sejajar atau setara antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang meminjam (yang menerima pinjaman), khususnya dalam hal ekonomi, dimana pihak yang memberi cenderung memiliki kelebihan kekuatan (power) secara ekonomi dibandingkan dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh pihak yang menerima pinjaman yang ada.⁷⁴

Pada tingkatan selanjutnya pinjaman menyebabkan melemahnya posisi Negara penerima, bahwa pembangunan negara menjadi terabaikan karena pinjaman, hal ini menyebabkan negara penerima menjadi tidak mandiri lagi (terutama dalam hal finansial), dan mengalami ketergantungan kepada negara pendonor.⁷⁵ Dimana negara berkembang (atau dalam analisa Wallerstein disebut dengan negara pinggiran) mengalami ketergantungan atas finansial dari negara pusat (negara maju).⁷⁶ Ketergantungan yang tinggi kemudian menyebabkan posisi tawar sebuah negara menjadi lemah, yang kemudian pula menyebabkan hanya

⁷⁴ Raymon, Ricky. Peran bantuan luar negeri Jepang dalam memperkuat hubungan ekonomi asimetris dengan Indonesia. hal. 93.

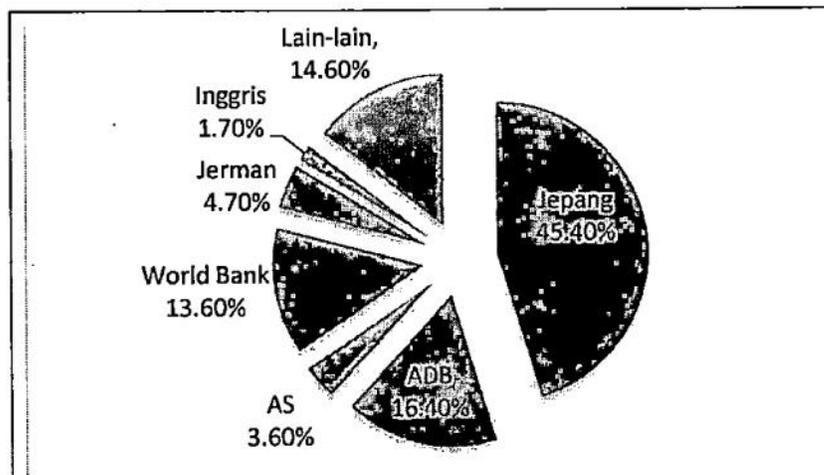
⁷⁵ Ibid. hal. 94

⁷⁶ Ibid.

kepentingan (ekonomi) dari Negara-negara yang kuat saja yang terakomodir dalam setiap hubungan ekonomi yang terjadi (seperti pembuatan perjanjian dan negoisasi dalam bidang ekonomi).

Untuk kasus Indonesia sendiri, ODA dengan tipe pinjaman mendominasi proporsi penyaluran ODA di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa ODA dalam bentuk pinjaman telah menjadi salah satu fondasi dasar bagi pembangunan ekonomi Indonesia, sejak awal Orde Baru. Bahkan, sampai saat ini Jepang bisa dikatakan masih menjadi pendonor pinjaman paling besar bagi Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat melihat grafik 4.1 (data sementara sampai tanggal 31 Januari 2009).

Grafik 4.2 Hutang Luar Negeri Indonesia Berdasarkan Kreditor tahun 2001-2009

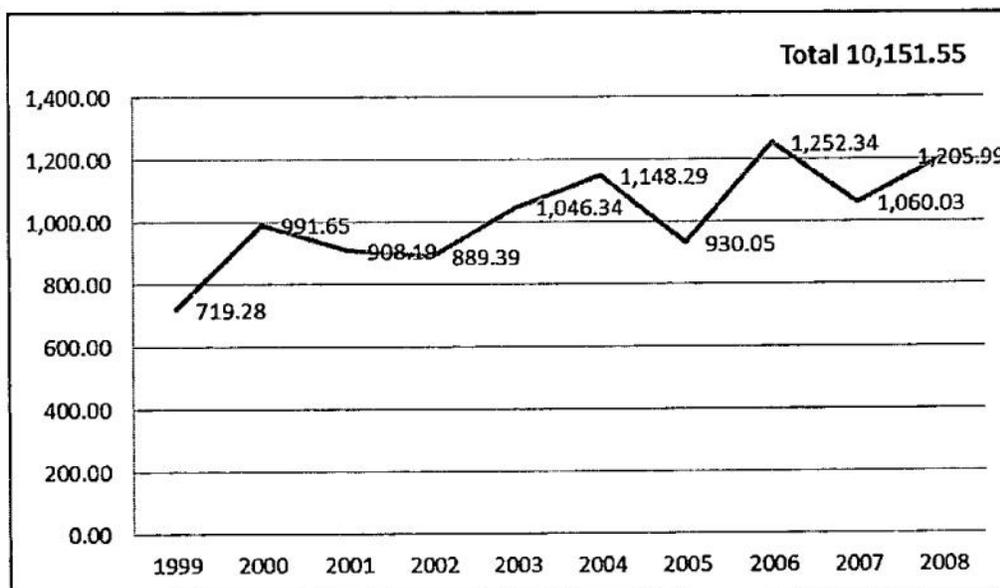


Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia. "Perkembangan Utang Negara (Pinjaman Luar Negeri dan Surat Utang Negara) 2001-2009, update 31 Januari 2009". hlm. 15. diakses dari www.dmo.or.id/dmodata/5Statistik/1Posisi_Utang/1Posisi_Utang_LN/Perkembangan_Utang_Negara_20090131.pdf. diakses 29 Juli 2013.

Dari grafik 4.1 dapat dilihat bahwa Jepang menjadi pendonor pinjaman nomor satu bagi Indonesia, mencapai 45,4 % persen atau 29,84 milyar Dollar AS

dari seluruh perolehan pinjaman luar negeri Indonesia sampai dengan tanggal 31 Januari 2009, sebesar 65,73 milyar Dollar AS. Pendonor kedua diduduki oleh ADB (Asian Development Bank) sebesar 16,4%. Jepang itu sendiri pada dasarnya menjadi pendonor terbesar dalam ADB. Bahkan untuk ADB itu sendiri, Indonesia merupakan debitor terbesar di dalamnya. Hal ini berarti pula bahwa Jepang tidak hanya menjadi pendonor pinjaman terbesar bagi Indonesia secara bilateral melainkan juga menjadi yang terbesar secara multilateral. Berikut adalah grafik rincian bantuan ODA Jepang berupa pinjaman kepada Indonesia dari tahun 1999 sampai 2008.

Grafik 4.3 Pinjaman Jepang ke Indonesia Tahun 1999-2008 (Dalam Jutaan Yen)



Sumber: Situs Bantuan ODA Jepang di Indonesia. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_loan.htm. Diakses 5 Agustus 2013.

Grafik diatas menunjukkan jumlah bantuan yang diberikan Jepang kepada Indonesia mengalami siklus naik turun dari tahun ke tahun, dari tahun 1999 sampai tahun 2000 pinjaman Jepang mengalami kenaikan mulai dari 719.28 juta Yen menjadi 991.65 juta Yen atau naik sebesar 272.37 juta Yen. Melalui program

pinjaman proyeknya, ODA Jepang jenis pinjaman (hutang) dapat pula menjadi 'alat' ataupun instrumen yang memperkuat hubungan yang tidak sejajar tersebut. Sekalipun Jepang telah mengumumkan dirinya untuk tidak mengikatkan (untied) ODA pinjamannya, akan tetapi pada sejumlah kasus, pinjaman yang diberikan harus mengikuti syarat-syarat Jepang. Dengan cara seperti ini Jepang mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yakni melalui hutang dimana tentunya akan meningkatkan ketergantungan Indonesia atas Jepang, terutama untuk pembiayaan proyek-proyek yang ada, serta kesempatan Jepang untuk mempromosikan industrinya.⁷⁷ Sebagai contohnya ialah Pemerintah Indonesia menerima pinjaman Bantuan untuk "Proyek Pengadaan Kapal Pencegah Bencana (Disaster Prevention Ships Procurement Project)" senilai 5,5 milyar Yen.⁷⁸ Pembuatan kapal itu dimulai pada Maret 2004 di Niigata Jepang dan selesai pada Desember 2004.⁷⁹ Hal ini tentunya berarti bahwa sejak perancangan, tender konsultan hingga pelaksanaan proyek Jepang menjadi pihak penentunya. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa ODA pinjaman memberikan peluang yang besar bagi Jepang untuk mendapatkan keuntungan ekonomis yang lebih dari program pinjamannya, serta melemahkan struktur industri nasional, karena industri nasional tidak diberi kesempatan yang cukup dalam program yang ada.

Berikut ini merupakan grafik rincian pinjaman ODA Jepang kepada Indonesia menurut bidang dari tahun 1999 sampai 2008.

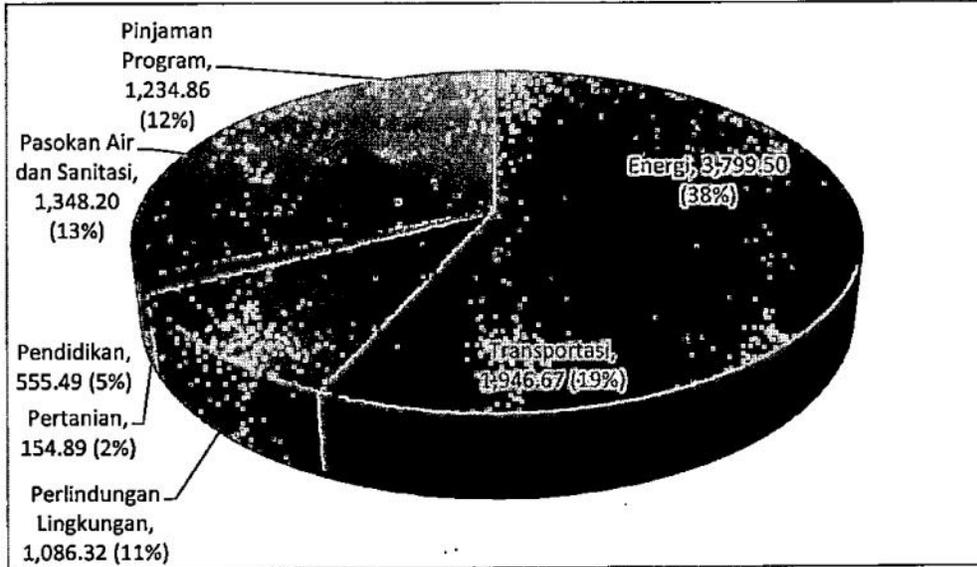
⁷⁷ Raymon, Ricky. Peran bantuan luar negeri Jepang dalam memperkuat hubungan ekonomi asimetris dengan Indonesia. hal. 96.

⁷⁸ <http://www.depkeu.go.id/ind/Data/jepang28105.htm>. Diakses 5 Agustus 2013.

⁷⁹ Ibid.

Grafik 4.4 Rincian Bantuan ODA Pinjaman Tahun 1999-2008 Menurut Bidang

(dalam jutaan Yen)



Sumber: Situs Bantuan ODA Jepang di Indonesia. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_loan.htm. Diakses 5 Agustus 2013.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar ODA yang disalurkan Jepang ke Indonesia dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008, lebih ditujukan bagi proyek-proyek yang terkait dengan permasalahan energi (listrik dan gas), seperti pembangunan dan peremajaan pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air, ataupun panas bumi (geothermal), yang mencapai 3,799,50 juta Yen atau setara dengan 38 persen dari total bantuan yang ada, yakni sebesar 10,125.93. juta Yen. Sektor transportasi menduduki urutan kedua sebesar 1,946.67 Yen atau sebesar 19 persen dari total ODA yang disalurkan ke Indonesia pada jangka waktu tersebut.

Contohnya pada 31 Maret 2004 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan mendapatkan bantuan pinjaman sebesar 3.437 juta Yen untuk rehabilitasi pelabuhan ikan Jakarta untuk meningkatkan

nutrisi masyarakat Indonesia dan pendapatan devisa Negara.⁸⁰ Bantuan ini merupakan implementasi dari KTT ke-9 ASEAN yang dihadiri oleh PM Jepang Junichiro Koizumi di Bali tahun 2003 dimana disepakatinya pembentukan komunitas ASEAN. Bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas.⁸¹ KTT juga menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: produk-produk pertanian, otomotif, perikanan, elektronik dan lain sebagainya. Proyek ini Untuk meningkatkan efektivitas fasilitas-fasilitas melalui perawatan dan pemeliharaan di pelabuhan ikan Jakarta, dan untuk memperpanjang usia pakai dan mengefektifkan sumber daya laut dan pesisir, proyek ini melaksanakan peninggian (1.349 mm) dermaga sisi timur dan barat yang dibangun pada periode 1 akibat penurunan permukaan tanah Jakarta. Selain itu, proyek ini juga merenovasi tanggul pemecah ombak di sisi barat pelabuhan, memperbaiki jalan raya di sekitar pintu pelabuhan, dan membangun fasilitas keamanan/keselamatan dermaga.⁸²

Contoh lainnya pada bulan Juli 2008 Indonesia mendapatkan bantuan pinjaman senilai 300 juta Dollar AS untuk mengatasi perubahan iklim yang dikenal "*climate change program loan*,"⁸³ pinjaman tersebut ditawarkan langsung

⁸⁰ Proyek Perbaikan Ikan Jakarta. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/projects/loan/odaprojects_loan_2003_5.htm. Diakses 2 September 2013

⁸¹ Kerjasama ekonomi ASEAN. <http://kemlu.go.id/Documents/Kerjasama%20Ekonomi%20ASEAN.doc>. Diakses 2 September 2013.

⁸² Proyek Perbaikan Ikan Jakarta. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/projects/loan/odaprojects_loan_2003_5.htm. Diakses 2 September 2013

⁸³ Indonesia Dapat Bantuan 300 Juta Dollar Untuk "Climate Change". <http://www.antaraneews.com/berita/109078/indonesia-dapat-bantuan-300-juta-dolar-untuk-climate-change>. Diakses 2 September 2013.

oleh PM Jepang Yasuo Fukuda kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan bilateral kepala pemerintah yang berlangsung di hari terakhir KTT G8 pada Juli 2008 di Hokkaido. Dan menindaklanjuti dari Konferensi Perubahan Iklim pada bulan Desember tahun 2007 di Bali. Dan pada kesempatan itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa Indonesia akan menggunakan bantuan itu seefektif mungkin.⁸⁴

Kemudian Japan International Cooperation Agency (JICA) berminat membantu program kredit mikro di Indonesia, sebagai tindak lanjut dari pertemuan Presiden JICA Tanaka Akihiko dengan Menko Perekonomian Hatta Radjasa. Dalam pertemuan Presiden JICA dan Menko, dibahas rencana kerjasama pengembangan Financial Inclusion Program atau lebih dikenal sebagai program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan untuk langkah awal, Deputi Menko Perekonomian Rizal Affandi Lukman bertemu dengan Hirota Koki, Director General of Southeast Asia and Pacific Department, JICA, yang dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa lembaganya menilai suku bunga KUR saat ini masih cukup tinggi".⁸⁵ Menurut Deputi Menko Perekonomian, sejumlah bank yang menjadi penyalur KUR, menetapkan bunga sebesar 22 persen untuk nilai pinjaman dibawah Rp 20 juta, sementara untuk yang diatas Rp 20 juta, dikenakan bunga sebesar 13 persen.

JICA menilai agar debitur kecil tidak kesulitan, maka tingkat bunga program KUR yang berlaku saat ini, sekitar dua kali lipat dari suku bunga normal, harus ditinjau ulang. Untuk itu, JICA rencananya akan melakukan kerjasama

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ JICA Minat Bantu Program Kredit Mikro di Indonesia.

<http://www.halojepang.com/kerjasamakebijakan/5431-jica>. Diakses 2 September 2013.

dengan Pemerintah Indonesia, " Untuk tahap awal mereka akan melakukan kajian suku bunga kredit usaha rakyat yang berlaku saat ini, dan kedua, meski belum ada komitmen namun menunjukkan minat untuk menyediakan pembiayaan dengan suku bunga rendah," ungkap Rizal. "Nantinya, Bank penyalur KUR bisa mendapatkan "pinjaman lunak" dari JICA, sehingga para pengusaha mikro yang meminjam akan dikenakan bunga KUR yang lebih ringan."

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimulai pada bulan November 2007, dengan tujuan memberikan pembiayaan bagi usaha mikro kecil, menengah dan koperasi, yang memiliki prospek bisnis dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, di sektor pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Menurut data yang dirilis Komite Kredit Usaha Rakyat Kementerian Koordinator Perekonomian, sampai bulan Juli 2012 telah disalurkan kredit senilai Rp 82,46 triliun, untuk 6,837,424 peminjam dengan rata-rata kredit setiap peminjam sebesar Rp 12,1 juta, dan kredit bermasalahnya (npl) hanya sebesar 3,4 persen.⁸⁶

Serta pada 05 Juli tahun 2001 Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Tata Kota dan Daerah menerima pinjaman dana sebesar 20.039 juta Yen⁸⁷ untuk proyek peremajaan infrastruktur daerah yaitu, melaksanakan pembenahan pondasi infrastruktur berupa fasilitas irigasi skala kecil, fasilitas kebersihan dan drainase darurat, pembenahan infrasturktur melalui perbaikan akses desa pertanian seperti jalan, jembatan dan lain-lain, di desa

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Proyek Peremajaan Infrastruktur Daerah. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/projects/loan/odaprojects_loan_2000_5.htm. Diakses 31 Agustus 2013.

pertanian miskin di 14 propinsi, seperti: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara dan lain-lain. Yang mana proyek ini dapat membantu kemandirian masyarakat kelas miskin sebagai strategi jangka menengah dan panjang pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan. Dan pinjaman ini merupakan kelanjutan dari “proyek perbaikan infrastruktur daerah” (21 juta Yen, yang ditandatangani November, 1994).⁸⁸

Dan pada 13 Desember tahun 2001 dimana Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan mendapatkan pinjaman sebesar 41.034 juta Yen untuk pembangunan jalur ganda rel kereta yang merupakan urat nadi jalur kereta Jabotabek untuk meningkatkan kapasitas transportasi dan efektifitas pengelolaannya.⁸⁹ Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas angkut dan efisiensi pengelolaan kereta dengan cara “menghapus” titik-titik persimpangan melalui pemisahan jalur dan atau pembuatan jalur ganda di jalur utama kereta Jawa (jalur kereta jarak jauh) dan Jabotabek (jalur komuter kerja), dimana jalur kereta baik Jawa maupun Jabotabek tersebut saling tumpang tindih. Selain itu, proyek ini juga memperpanjang dan melakukan elektrifikasi jalur kereta antara Bekasi-Cikampek yang merupakan jalur komuter kerja. Dengan demikian jumlah penumpang pekerja yang menjadi komuter kereta akan meningkat dan dapat menyokong kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Dari kedua data dan beberapa contoh tersebut juga dapat dikatakan bahwa melalui instrumen pinjamannya, Jepang telah berhasil memperkuat hubungan ekonomi dengan Indonesia, yakni dengan cara menciptakan ketergantungan

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Elektrifikasi Rel Kereta dan Penggandaan Rel jalur Utama, Jawa. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/projects/loan/odaprojects_loan_2000_1.htm. Diakses 31 Agustus 2013.

finansial bagi Indonesia kepada Jepang. Jepang membuat dirinya 'berharga' di mata Indonesia, dan karena itu tentunya akan membuat posisi tawar (bargaining position) Indonesia menjadi lemah. Posisi tawar Indonesia yang lemah tentunya menyebabkan kepentingan nasionalnya akan sulit tercapai, karena akan selalu 'berbenturan' dengan kepentingan Jepang yang akan cenderung didahulukan. Hal ini bisa dilihat dalam setiap kebijakan dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan cenderung mendukung atau setidaknya tidak merugikan aktivitas ekonomi Jepang di Indonesia. Dengan kata lain, Jepang 'menggiring' Indonesia untuk menjadi konsumen bagi komoditas industrinya. Salah satunya ialah konsumsi barang-barang kendaraan bermotor (otomotif), baik roda dua maupun roda empat. Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada tabel 4.1 yang memaparkan mengenai perkembangan penjualan mobil dan motor di Indonesia.

Tabel 4.1: Perkembangan Penjualan Mobil dan Motor di Pasar Indonesia Pada Tahun 2002-2005 (Unit)

Mobil				
Produsen	2002	2003	2004	2005
Toyota	80.069	84.297	100.860	182.765
Mitsubishi	66.105	75.390	77.104	89.158
Suzuki	53.187	63.515	70.514	87.274
Honda	11.510	13.113	21.650	53.750
Daihatsu	20.592	20.228	21.698	48.762
Lainnya	52.845	47.086	45.197	56.765
Total	303.689	336.645	463.903	518.474
Motor				
Produsen	2002	2003	2004	2005
Honda	1.437.934	1.577.895	2.036.927	2.648.888
Yamaha	369.487	574.130	884.084	1.236.114
Suzuki	442.396	584.254	844.235	1.092.051
Kawasaki	53.890	66.726	107.106	77.043
Piaggio	5.209	3.101	2.102	915
Kymco	9.075	17.597	26.120	15.208
Kanzen	0	0	0	19.206
Total	2.317.991	2.823.702	3.900.518	2.463.355

Sumber: <http://www.kadin-indonesia.or.id/enn/images/dokumen/KADIN-42-1290-17102006.pdf>. Diakses 3 Agustus 2013.

Untuk penjualan mobil, Toyota merupakan merk mobil yang tingkat penjualan produksinya paling besar di Indonesia (dari tahun 2002-2005). Posisi kedua ditempati oleh Mitsubishi, yang kemudian disusul oleh Suzuki, Honda dan Daihatsu sebagai selanjutnya. Untuk merk mobil non-Jepang, dalam data di atas dimasukkan ke dalam kategori lainnya. Sedangkan untuk penjualan motor, merk motor yang paling banyak terjual ialah merk motor Jepang, yakni Honda dan sejumlah merk motor Jepang lainnya. Sedangkan untuk merk motor non-Jepang dalam data di atas ialah Kymco (Taiwan) dan Piaggio (Italia) hanya menduduki posisi lima dan enam, dengan selisih jumlah penjualan yang cukup tinggi dengan motor merk Jepang. Bahkan motor merk Kanzen mengalahkan jumlah penjualan kedua perusahaan motor non-Jepang tersebut. Padahal Kanzen baru mulai penjualannya di Indonesia pada tahun 2005.

Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan komoditas otomotif baik motor maupun mobil didominasi oleh merk Jepang. Hal ini bisa juga berarti bahwa ketergantungan Indonesia atas produksi kendaraan bermotor Jepang cukup tinggi. Secara jangka panjang ketergantungan semacam ini dapat menurunkan tingkat kemandirian Indonesia dalam hal otomotif. Penurunan tingkat kemandirian Indonesia tentunya berdampak pada sulitnya Indonesia untuk membangun diri, karena segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembangunan bergantung kepada Jepang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Perusahaan Jepang di Indonesia yang tergabung dalam The Jakarta Japan Club bertamu ke Kementerian Perindustrian pada Januari 2013. Delegasi industri Jepang yang mendatangi Kemenperin diwakili Honda, Mitsubishi, Toyota, dan JFE Steel Corporation. Pemimpin delegasi adalah Duta Besar Jepang untuk Indonesia

Yoshinori Katori.⁹⁰ Pertemuan itu membahas kemungkinan bagi masuknya industri komponen otomotif asal Negeri Matahari Terbit itu ke Tanah Air, bahkan pada tahun sebelumnya sudah ada 50 perusahaan komponen Jepang yang telah masuk Indonesia. Toyota dan Daihatsu melalui Astra Internasional ingin menambah industri komponen lebih dari 35 perusahaan.⁹¹ Sementara Nissan memasukkan 10 mitra. Honda juga akan melakukan langkah serupa, meski jumlahnya belum ditentukan. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa mandiri dalam industri otomotif, Ketidak mandirian Indonesia juga berarti adanya hubungan ekonomi yang tidak seimbang, karena harus selalu berada dalam 'bayang-bayang' Jepang, yang 'menopangnya'.

2. Dana Hibah

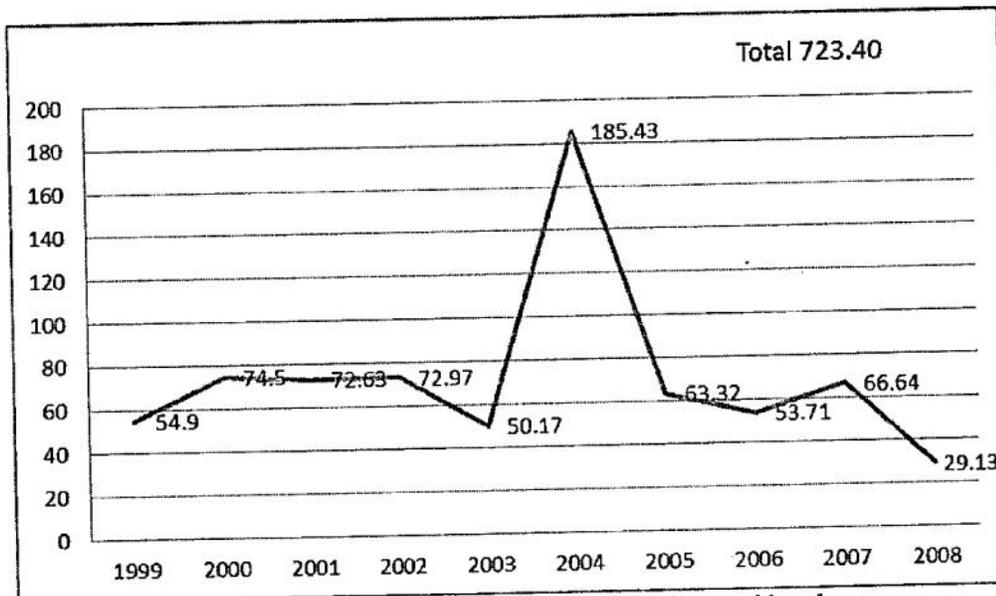
Sekalipun tidak sebesar ODA dalam bentuk pinjaman, hibah juga memainkan peranan yang penting dalam memperkuat hubungan Jepang dengan Indonesia pasca krisis Asia, terutama untuk hibah yang bersifat proyek. Memang tidak semua hibah yang disalurkan oleh pemerintah Jepang bertujuan untuk memperkuat hubungan yang tidak berimbang. Sebagai contohnya ialah hibah kemanusiaan untuk bantuan bencana alam, serta hibah untuk meningkatkan prasarana publik, seperti pendidikan (beasiswa dan penyediaan peralatan pendidikan) dan kesehatan. Akan tetapi hal tersebut merupakan contoh kecil dari contoh lainnya. Contoh dari hibah yang terkait dengan pencapaian kepentingan

⁹⁰ Jepang berambisi kuasai industri komponen otomotif di Indonesia
<http://www.merdeka.com/uang/jepang-berambisi-kuasai-industri-komponen-otomotif-di-indonesia.html>. Diakses 19 Agustus 2013.

⁹¹ Ibid.

ekonomi Jepang dan penguatan hubungan ekonomi yang tidak berimbang oleh pemerintah Jepang ialah hibah proyek. Salah satunya ialah pembangunan infrastruktur, seperti jembatan (pembangunan jembatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2006).⁹² Berikut adalah grafik bantuan ODA dalam bentuk hibah dari tahun 1999 sampai dengan 2008.

Grafik 4.5 Bantuan Hibah Jepang ke Indonesia Tahun 1999-2008 (Dalam Jutaan Yen)

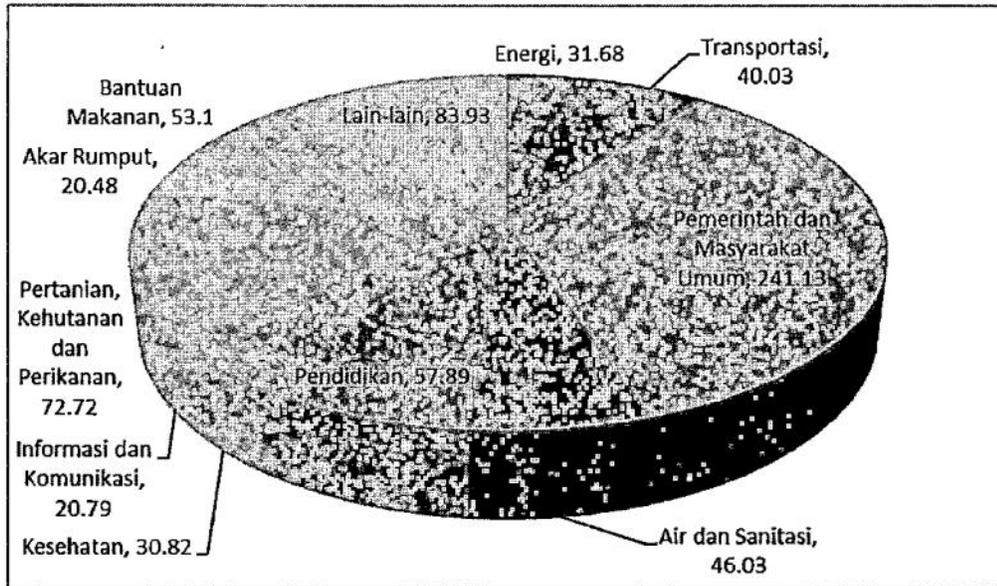


Sumber: Situs Bantuan ODA Jepang di Indonesia. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_grant.htm. Diakses 5 Agustus 2013.

Grafik diatas menunjukkan keadaan bantuan yang diberikan Jepang kepada Indonesia mengalami naik turun, bahkan pada tahun 2004 bantuan hibah yang diberikan Jepang kepada Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 50.17 juta Yen menjadi 185.43 juta Yen atau mengalami kenaikanaik sebesar 135.36 juta Yen.

⁹² Situs bantuan ODA Jepang di Indonesia. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/projects/grant/odaprojects_grant_2005_ntt.htm. Diakses 3 Agustus 2013.

Grafik 4.6 Rincian Bantuan Hibah Jepang ke Indonesia Tahun 1999-2008 (Dalam Jutaan Yen)



Sumber: Situs Bantuan ODA Jepang di Indonesia. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_grant.htm. Diakses 5 Agustus 2013.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar bantuan hibah yang disalurkan Jepang ke Indonesia dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008, lebih ditujukan bagi proyek-proyek pemerintah dan masyarakat umum, yang mencapai 241.13 juta Yen atau setara dengan 34 persen dari total bantuan yang ada, yakni sebesar 723.6 Yen. Sektor transportasi menduduki urutan kedua sebesar 72.72 juta Yen atau sebesar 10 persen dari total ODA yang disalurkan ke Indonesia pada jangka waktu tersebut.

Disela-sela pertemuan ketiga Komite Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (sidang ketiga PrepCom KTT) Pembangunan Berkelanjutan di New York, Ketua Delegasi Jepang (Seiji Morimoto) menemui ketua Delegasi RI yang dijabat Dirjen

HELN Departemen Luar Negeri, untuk menyampaikan usulan kerjasama dalam bentuk partnership, khususnya di bidang illegal logging.⁹³

Terkait dengan hal ini, Pemerintah Jepang bermaksud menjajaki kemungkinan pertemuan dengan Departemen Kehutanan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama April 1996 di Tokyo.⁹⁴

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang bidang kehutanan telah dilakukan sejak akhir 1960, sebelum Indonesia menerapkan sistem HPH dalam pengelolaan hutannya, yaitu dengan dilaksanakannya proyek "Mountain Logging Practice in Java". Di samping kerjasama proyek, juga dilaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan kerja, technical assistance, pengelolaan hutan, dan perdagangan hasil hutan. Kerjasama ini dilaksanakan baik melalui instansi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

Saat ini kerjasama Indonesia dengan Jepang meliputi berbagai aspek bidang kehutanan, antara lain: bidang konservasi, pengembangan sumberdaya manusia, dan bidang reboisasi dan rehabilitasi hutan. Kerjasama dengan pemerintah Jepang dilakukan melalui kerjasama bilateral regional maupun multilateral dalam bentuk loan (pinjaman) dan grant (hibah). Kerjasama tersebut pada umumnya dalam bentuk grant-aid, technical assistance, serta pengiriman staf Departemen Kehutanan untuk mengikuti pendidikan, training, seminar dan kegiatan lainnya di Jepang.

Dan pada tahun 2002 pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dana hibah sebesar 1.11 juta Yen untuk rencana perbaikan jalan pemadam kebakaran

⁹³ Indonesia-Jepang Jalin Kerjasama Kehutanan. <http://www.menlh.go.id/indonesia-jepang-jalin-kerjasama-bidang-kehutanan/#sthash.rdjageTw.dpuf>. Diakses 2 September 2013.

⁹⁴ Ibid.

hutan taman nasional.⁹⁵ Sebagai pencegahan agar lebih mudah jika terjadi kebakaran di hutan taman nasional.

Contoh lainnya adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada 17 September 2004 mendapatkan dana hibah sebesar 518 juta Yen atau setara dengan Rp 43,4 milyar sebagai usaha bagi pelaksanaan Reformasi Kepolisian sejak POLRI dipisahkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁹⁶ Berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Jepang juga terus mendukung usaha-usaha reformasi POLRI tersebut. Dukungan diberikan antara lain dengan mengirimkan sejumlah tenaga ahli kepolisian dengan bermacam keahlian, termasuk penasihat senior yang diperbantukan kepada KAPOLRI, dan juga dengan menerima banyak anggota POLRI untuk memperoleh pelatihan di Badan Kepolisian Nasional Jepang setiap tahun, dll.⁹⁷

Berdasarkan Proyek ini, Pemerintah Indonesia akan memperoleh sejumlah perlengkapan Sistem Komunikasi Radio, Perlengkapan Identifikasi Kriminal di TKP (Tempat Kejadian Perkara), dan perlengkapan seperti Identifikasi Drug yang umum, guna membantu para tenaga ahli kepolisian Jepang yang diperbantukan di POLRES Bekasi di mana sedang dilaksanakan peningkatan kegiatan Polisi Sipil. Proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi realisasi Polisi untuk Rakyat.

Dan bantuan hibah sebesar 1,046 milyar Yen (\pm US\$ 9 juta / Rp 74 milyar) untuk Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Propinsi Tengah untuk

⁹⁵ Bantuan Hibah. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_grant.htm. Diakses 2 September 2013.

⁹⁶ Peningkatan Polisi Sipil. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/projects/grant/odaprojects_grant_2004_jabar.htm. Diakses 31 Agustus 2013.

⁹⁷ Ibid.

proyek peremajaan jembatan di Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.⁹⁸ Proyek ini dimaksudkan membantu perbaikan sejumlah jembatan di kawasan yang terkena bencana alam berupa gempa bumi dan banjir secara beruntun yang melanda pulau Sulawesi pada tahun 2000.⁹⁹ Di antara jembatan yang terkena bencana, sebanyak 16 jembatan diperbaiki secara khusus untuk menyelamatkan daerah sekitarnya yang dikhawatirkan dapat menjadi terisolasi akibat kerusakan jembatan. Pemerintah Jepang menganggap upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat setempat, demi kemajuan masyarakat Indonesia secara seimbang, sebagai salah satu bantuan terpenting. Dengan adanya bantuan hibah dari pemerintah Jepang ini, diharapkan lalu-lintas daerah setempat dapat menjadi lancar sehingga taraf hidup masyarakat sekitar menjadi lebih baik.

Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan bantuan hibah guna melaksanakan "Proyek Pembangunan Jembatan di Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara" sejumlah 1,046 miliar yen (sekitar US\$ 9 juta atau Rp. 74 miliar berdasarkan kurs pada waktu itu) yang nota kesepakatannya telah ditandatangani pada tanggal 29 Mei 2003.¹⁰⁰

Dalam kasus ODA hibah, tidak ada proses tender (dengan kata lain masih terikat), sehingga aktor pelaksanaannya tentunya akan berasal dari pihak Jepang. Melalui hibah, pemerintah Jepang meningkatkan aktivitas industrinya yang mengalami 'kelesuan' akibat stagnasi ekonomi Jepang. Contohnya ialah hibah kereta rel listrik (KRL) dari Jepang pada tahun 2004, dimana pemerintah

⁹⁸ Proyek Peremajaan Jembatan di Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.
http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/projects/grant/odaprojects_grant_2003_sulteng.htm.
Diakses 31 Agustus 2013.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

Indonesia menerima 4 set KRL atau setara dengan 16 unit KRL.¹⁰¹ Sekalipun hibah, pemerintah Indonesia masih harus tetap mengeluarkan dana sebesar 8 milyar Rupiah sebagai biaya pengirimannya. Perusahaan Sumitomo 'ditunjuk' sebagai pihak pemasok. Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa dalam hibah sekalipun, usaha pemerintah Jepang untuk meningkatkan ekonominya masih dapat dilihat, salah satunya dengan menetapkan perusahaan Sumitomo sebagai pihak pemasoknya. Bahkan Direktur Utama PT KAI Commuter Trihandoyo mengatakan pihaknya lebih memilih KRL bekas dibandingkan baru karena dinilai dari aspek harga yang jauh lebih murah.¹⁰² Menurut Tri, harga KRL baru asal Jepang per unit/gerbong bisa mencapai Rp 10 miliar. Sedangkan untuk buatan PT INKA (persero) bisa mencapai Rp 8 miliar/unit. Harga KRL bekas hanya berharga Rp 1 miliar/unit. jumlah KRL bekas yang didatangkan dari Jepang sudah mencapai 308 unit terhitung sejak tahun 2009.¹⁰³ PT KAI Commuter Jabodetabek akan mendatangkan hingga 180 unit gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas asal Jepang tahun 2013. PT. KAI merupakan salah satu bagian dari industri strategis nasional, dan hal itu berarti pula bahwa industri semacam itu dibutuhkan dalam pembangunan setiap negara, termasuk Indonesia. Hibah KRL membuat Indonesia menjadi tergantung kepada komoditas teknologi Jepang. Sehingga adalah hal yang mungkin, jika hal ini terus berlanjut, maka suatu saat nanti setiap kebutuhan strategis Indonesia akan disuplai oleh Jepang, bukan dengan memproduksinya sendiri.

¹⁰¹ PT KAI terima hibah 4 set KRL. <http://www.tempo.co/read/news/2004/02/06/05639342/PT-KAI-Terima-Hibah-4-Set-KRL>. Diakses 29 Juli 2013.

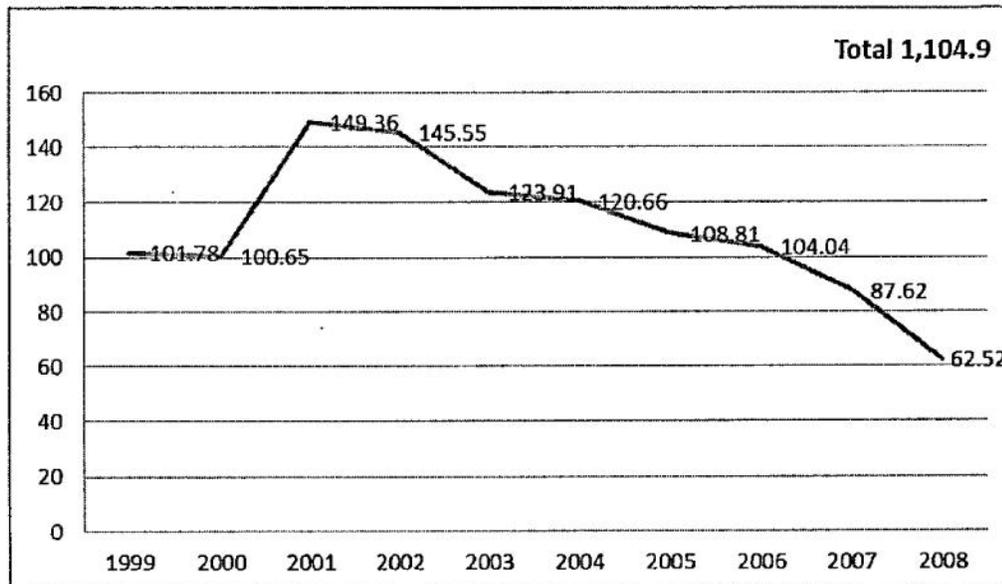
¹⁰² Nurhayat, Wiji. Alasan KRL Commuter yang Pilih Beli Kereta Bekas Ketimbang Baru. <http://finance.detik.com/read/2013/01/07/151839/2135166/4/alasan-kai-commuter-yang-pilih-beli-kereta-bekas-ketimbang-baru>. Diakses 19 Agustus 2013

¹⁰³ Ibid.

3. Kerjasama Teknis

Sama halnya dengan ODA hibah, kerjasama teknis juga digunakan Jepang untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Indonesia, sekalipun tidak semua program kerjasama teknis terkait dengan hal tersebut, seperti pelatihan dan beasiswa. Akan tetapi hal itu merupakan salah satu contoh kecil saja. ODA kerjasama teknis pada umumnya tidak bergerak sendiri kecuali untuk kasus pemberian beasiswa, pelatihan, serta bantuan kemanusiaan, melainkan sering kali merupakan bagian dari proyek ODA lainnya, seperti pelaksanaan dalam implementasi proyek ODA yang ada. Sama halnya dengan ODA dalam bentuk pinjaman, kerjasama teknispun membuat posisi Indonesia menjadi lemah, karena membuat Indonesia tergantung kepada keahlian teknis Jepang, baik dalam hal penelitian ataupun pelaksanaan (implementator) proyek ODA yang ada. Hubungan ekonomi yang tidak seimbang terjadi pada tahap ini. Grafik berikut menunjukkan bagaimana ODA yang disalurkan ke Indonesia, pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kepentingan ekonomi Jepang. Berikut adalah grafik bantuan kerjasama teknis yang diberikan Jepang kepada Indonesia dari 1999 samapai 2008.

Grafik 4.7 Kerjasama Teknis Jepang Dengan Indonesia Tahun 1999-2008 (Dalam Jutaan Yen)



Sumber : Situs Bantuan ODA Jepang di Indonesia. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_techco.htm. Diakses 5 Agustus 2013

Jika melihat grafik kerjasama teknis yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia ditahun dari tahun 1999 sampai tahun 2008, sempat mengalami kenaikan pada tahun 2001, yaitu dimana sebelumnya di tahun 2000 hanya 100.65 juta Yen menjadi 145.55 juta Yen atau mengalami kenaikan sebesar 44.9 juta Yen. Tetapi setelah tahun 2001 bantuan kerjasama teknis Jepang mulai mengalami sampai pada puncak ditahun 2008 dimana bantuan yang diberikan sebesar 62.52 juta Yen atau turun sebesar 86.84 juta Yen dari tahun 2001. Akan tetapi sekalipun secara kualitatif telah terjadi penurunan bantuan, Indonesia masih dipandang penting untuk mendapat bantuan kerjasama teknis. Tentunya kerjasama teknis yang diberikan untuk menunjang kepentingan ekonomi Jepang. Berikut ini adalah tabel bantuan kerjasama teknik berdasarkan skema dari tahun 1999-2008

Tabel 4.2 Proyek Kerjasama Teknik Berdasarkan Skema Tahun 1999-2008

Penerimaan Peserta Pelatihan	33.041 orang
Pengiriman tenaga ahli	5334 orang
Pengiriman tim studi	6341 orang
Penerimaan mahasiswa asing	10.669 orang
Tenaga ahli muda	93 orang
Skema sukarelawan lainnya	54 orang
Jumlah	55.532 orang

Sumber: Situs Bantuan ODA Jepang di Indonesia. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/odaprojects_techco.htm. Diakses 5 Agustus 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan peserta pelatihan mendapatkan porsi pelatihan yang paling banyak yaitu sebanyak 33.041 orang dari jumlah orang yang menerima pelatihan sebanyak 55.532 orang, penerimaan mahasiswa asing berada pada urutan kedua yang mendapatkan bantuan ODA kerjasama teknik ini yaitu sebanyak 10.669 orang. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa bantuan yang diberikan tidaklah semata-mata tanpa maksud dan tujuan yang jelas, melainkan untk menunjang kepentingan ekonomi Jepang.

Contohnya adalah Sejak 1984, dalam rangka dukungannya terhadap pembangunan bangsa di berbagai negara berkembang, JICA memfasilitasi suatu program pelatihan untuk penguatan kapasitas para pemuda-pemudi yang memiliki potensi sebagai pemimpin untuk menduduki berbagai posisi penting di masa

depan melalui “Program Persahabatan Pemuda Jepang-ASEAN” sebagai bagian dari bantuan resmi Pemerintah Jepang. Sampai dengan 2006, sebanyak 3.200 pemuda-pemudi Indonesia dari 33 propinsi telah ikut serta dalam program ini.¹⁰⁴ Beberapa dari mereka bahkan sekarang telah menjadi pemimpin yang sukses di bidangnya masing-masing, termasuk bidang ekonomi, politik dan social.¹⁰⁵ Pada tahun 2007, sebanyak 90 peserta telah dipilih oleh Sekretariat Negara, untuk mengikuti 5 program pelatihan untuk para pemimpin muda yang ditawarkan di bidang pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, administrasi daerah, dan kesejahteraan sosial.¹⁰⁶ Sebagian besar dari para peserta yang terpilih ini merupakan pegawai negeri, peneliti, dan anggota LSM yang bekerja di bidang-bidang tersebut. Selama masa pelatihan, seluruh peserta berkesempatan mengunjungi institusi yang terkait dengan bidang keahliannya, lokasi wisata terkenal, mencoba berbagai moda transportasi publik, serta mengamati kebiasaan dan tradisi masyarakat Jepang. Tetapi sepulangnya para pemuda ini dari pelatihan ada pandangan ingin “men-Jepangkan” Indonesia, sebagai mana yang dikatakan oleh salah satu peserta pelatihan yang mendapat program pelatihan di bagian Pelayanan Kesehatan dan Medis (Pelayanan Kesehatan Masyarakat): “Sebagian besar pelayanan kesehatan di Jepang tersedia melalui sistem asuransi kesehatan publik, yang mencakup seluruh penduduk dan dibiayai oleh gabungan kontribusi dari individu, pengusaha, serta subsidi pemerintah. Saya berharap sistem semacam ini dapat diterapkan di Indonesia di

¹⁰⁴ Para pemimpin muda masa depan Indonesia dilatih di Jepang.

<http://www.jica.go.jp/indonesia/indonesian/office/others/prof05.html>. Diakses 5 Agustus 2013

¹⁰⁵ Ibid.

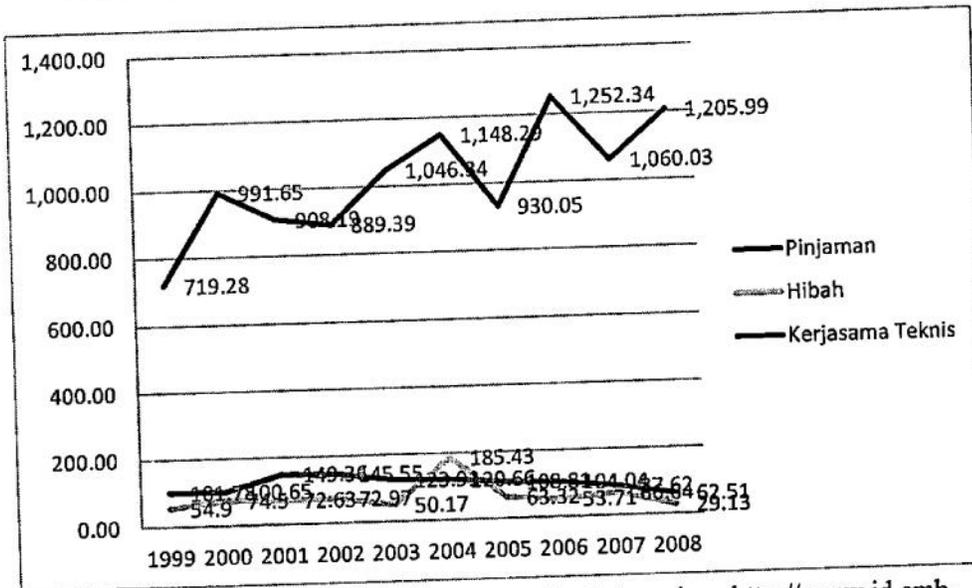
¹⁰⁶ Ibid.

masa depan”.¹⁰⁷ Walaupun wacana ini baik, tetapi secara tidak langsung Jepang telah mempromosikan negaranya dan menunjukkan kepada Indonesia bahwa ekonomi dan kehidupan di Jepang sudah sangat maju dan Indonesia perlu banyak belajar dari Jepang.

Pada era ini ODA Jepang ditandai oleh sejumlah karakteristik, diantaranya ialah tren perkembangan ODA Jepang yang terus mengalami penurunan, yang kemudian berimbas pada ‘kalahnya’ Jepang dalam mempertahankan posisi sebagai top-donor, yang kemudian (pada tahun 2002) diambil alih oleh Amerika Serikat. Untuk contoh kasus Indonesia sendiri, penurunan ODA Jepang juga disebabkan oleh munculnya Cina dan Vietnam (di kawasan Asia Pasifik) sebagai ‘saingan’ bagi Indonesia. Cina dan Vietnam mulai menjadi ‘berharga’ di mata Jepang, dan akibatnya, mulai pula terjadi pengalihan aliran, baik aliran ODA maupun aliran FDI Jepang. Berikut adalah perkembangan ODA Jepang di Indonesia dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 secara keseluruhan.

¹⁰⁷ Ibid.

Grafik 4.8 ODA Jepang di Indonesia dari tahun 1999-2008 (Juta Yen)



Sumber: Situs Bantuan ODA Jepang di Indonesia. http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/datastat_01.htm. Diakses 5 Agustus 2013.

Jika melihat pada jumlah ODA yang disalurkan setiap tahunnya pasca krisis Asia, dan kemudian membandingkannya dengan jumlah ODA (per-tahun) pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya dari awal Jepang menjadi top-donor, sampai dengan terjadinya krisis Asia, maka akan terlihat terjadinya penurunan jumlah ODA yang disalurkan ke Indonesia. Akan tetapi penurunan ODA ini tidaklah terlalu berpengaruh dalam contoh kasus Indonesia, karena pada dasarnya Jepang tetap menjadi negara yang paling banyak menyalurkan ODA-nya di Indonesia sendiri, dibandingkan dengan pendonor lainnya, baik bersifat bilateral maupun multilateral. Hal ini dapat dilihat dalam presentase jumlah ODA di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada grafik 4.1, dimana Jepang menjadi pendonor pinjaman nomor satu bagi Indonesia, mencapai 45,4 % persen atau 29,84 milyar Dollar AS dari seluruh perolehan pinjaman luar negeri Indonesia sampai dengan tanggal 31 Januari 2009, sebesar 65,73 milyar Dollar

AS. Pendonor kedua diduduki oleh ADB (Asian Development Bank) sebesar 16,4%. hal ini tentunya menunjukkan bahwa posisi Jepang masih sangat penting bagi ekonomi Indonesia, sekalipun secara ODA Jepang secara total (jumlah ODA-nya di dunia maupun di Indonesia) mengalami penurunan secara kuantitas.

Turunnya jumlah bantuan ini dari jumlah tahun lalu, terutama ODA pinjaman, disebabkan karena naiknya harga minyak mentah pada tahun 2007 serta mulai terjadinya krisis pada pasar Amerika pada awal tahun 2008, yang nantinya akan memicu krisis finansial global. Akan tetapi hal ini tidak menyebabkan Jepang mengurangi 'perhatiannya' atas Indonesia. Ini disebabkan karena pada tahun 2007 juga Jepang dan Indonesia mensepakati kerjasama kemitraan ekonomi (EPA), yang inti perjanjiannya ialah liberalisasi sektor perekonomian, yang dalam hal ini ialah perdagangan dan investasi.

Bantuan ekonomi yang diberikan Jepang kepada Indonesia baik itu berupa pinjaman dalam bentuk Yen, dana hibah, dan kerjasama teknik, tidak semata-mata hanya untuk menutupi dosa masa pendudukan Jepang di Indonesia selama masa Perang Pasifik berlangsung. Karena segala bentuk bantuan ekonomi dilakukan oleh Jepang pasca Perang Pasifik baik itu kepada Indonesia atau Negara lainnya tidak akan lepas dari pada keuntungan ekonomi Jepang.

JICA melalui penyaluran ODA bisa dikatakan memiliki peranan yang cukup besar bagi terciptanya *economic partnership*. Melalui ODA yang diberikan, terutama hutang, Jepang membuat Indonesia menjadi tergantung akan peranannya bagi pembangunan Indonesia, sehingga tentunya melemahkan posisi tawar Indonesia. Selain itu pula peran ODA juga bisa dikatakan sebagai 'pelicin' bagi terbentuknya kesepakatan tersebut. Hal ini disebabkan karena dengan

perjanjian ini Jepang berjanji untuk meningkatkan bantuan luar negerinya ke Indonesia terutama dalam hal *capacity building*, yakni peningkatan kapasitas Indonesia dalam berbagai bidang terkait dengan EPA, seperti peningkatan mutu dan nilai industri yang ada.

Tepat pada tanggal 1 Juli 2008, perjanjian *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) antara Indonesia dengan Jepang resmi mulai berlaku. Perjanjian yang telah ditandatangani dan diratifikasi pada 20 Agustus 2007 ini sebenarnya sudah dirundingkan sejak tahun 2006. Cakupan EPA tidak hanya pada sektor perdagangan tetapi meliputi sektor jasa, investasi, migrasi, pariwisata, standarisasi peraturan dan hak kekayaan intelektual.¹⁰⁸

Kerjasama IJEPA dilandasi atas tiga hal, yaitu *Liberalization* (Pembukaan Akses Pasar), *Facilitacion* (Akses Pasar yang mudah) dan *Cooperation* (Kerjasama untuk Peningkatan Kapasitas).

IJEPA itu sendiri bisa dikatakan sebagai 'puncak' dari strategi ekonomi Jepang atas Indonesia, karena dalam kerjasama ini Jepang dapat mengatur, meningkatkan, serta mengamankan unsur perdagangan, investasi, serta kebutuhan energi, sekaligus dalam 'satu atap'. Selain itu pula terbentuknya EPA dengan Indonesia, akan semakin memperkuat dan mengamankan jaringan dan kepentingan ekonominya di ASEAN. Hal ini disebabkan oleh keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri, yakni sebagai negara terbesar secara wilayah geografis maupun secara populasi, sebagai negara yang memiliki SDA yang melimpah, serta posisi Indonesia yang penting dan berpengaruh dalam organisasi ASEAN (Jepang memandang Indonesia sebagai salah satu 'pintu-masuk'

¹⁰⁸ Rahadhian T. Akbar. *Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret Kerjasama*. 2011. Pustaka Pelajar. hlm. 58.

ASEAN), yang tentunya dapat 'mempercepat' terciptanya integrasi ekonomi ASEAN.

Dalam kemitraan ini pula, bentuk penguatan hubungan ekonomi yang tidak sejajar antara Jepang dengan Indonesia dapat dilihat, seperti dalam hal liberalisasi investasi. Bahkan sejak awal Jepang telah 'mendesak' Indonesia untuk segera mengatasi sejumlah persoalan yang terkait dengan investasi. Sebagai contohnya ialah saat kunjungan Presiden Yughoyono pada bulan November 2006 ke Jepang. Ketika Presiden Yudhoyono menyatakan pentingnya mempercepat penyelesaian perundingan EPA Indonesia-Jepang November 2006, Perdana Menteri Shinzo Abe dengan gesit "menyambar" dengan statement bahwa untuk itu Indonesia harus menjamin pasokan gas alam untuk Jepang, selain segera menyelesaikan Undang-Undang Penanaman Modal.¹⁰⁹ Undang-undang tersebut kemudian disahkan pada tahun 2007. Dari contoh tersebut bisa dilihat adanya bentuk tekanan oleh Jepang kepada Indonesia untuk segera membuat 'payung' hukum yang dapat melindungi dan memberikan ruang lebih bagi investasi Jepang di Indonesia. Bahwa 'pelonggaran' atas investasi langsung dapat berakibat penguasaan dan juga control atas sektor-sektor strategis Indonesia oleh Jepang, sebagai contohnya ialah energi (gas alam). Dampak lain dari liberalisasi investasi ini ialah membanjirnya investasi Jepang ke hampir semua sektor.

Sebagai contohnya ialah masuknya investasi dibidang ritel (minimarket) oleh perusahaan Jepang 7-eleven pada tahun 2008.¹¹⁰ Yang kemudian menjadi persoalan ialah bahwa perusahaan ini bergerak pada level mikro. Perusahaan ini

¹⁰⁹ Syamsul Hadi, "Kerjasama Indonesia-Jepang", dalam Kompas 20 Agustus 2007

¹¹⁰ <http://finance.detik.com/read/2008/11/07/120517/1032954/4/7-eleven-akan-masuk-lewat-joint-venture>. Diakses 29 Juli 2013.

kemudian akan bersaing dengan warung-warung kecil di sekitar pemukiman penduduk. Persaingan yang tidak seimbang secara logika tentunya menjadikan perusahaan ritel Jepang sebagai pemenangnya. Permasalahan selanjutnya ialah bahwa melalui perusahaan tersebut produk-produk Jepang akan semakin membanjiri pasar Indonesia (dominasi produk Jepang). Pada umumnya perusahaan-perusahaan ritel yang ada akan menggunakan komoditas dari Negara asalnya sebagai barang dagangannya. Termasuk juga perusahaan 7-eleven, yang tentunya akan menggunakan barang-barang produksi dari Jepang.

Selain melalui liberalisasi investasi, penguatan hubungan-ekonomi yang tidak berimbang antara Jepang dengan Indonesia dalam EPA juga terlihat dalam hal pengurangan dan bahkan penghapusan segala bea masuk (liberalisasi perdagangan). Secara umum, mungkin hal semacam ini terlihat menguntungkan Indonesia, karena hal tersebut berarti bahwa produk Indonesia akan lebih mudah masuk ke Jepang tanpa terkena biaya masuk. Akan tetapi sesungguhnya hal tersebut justru akan merugikan Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia dan Jepang berada pada level yang berbeda. Tanpa harus menaikkan standar yang ada, standar Jepang akan suatu produk pada dasarnya sudah tinggi, sehingga Indonesia-lah yang kemudian menyesuaikan diri dengan standar tersebut. Dapat dipastikan bahwa produk Jepang yang masuk ke Indonesia sudah tentu telah memenuhi standar yang ada, akan tetapi tidak sebaliknya, dimana produk Indonesia yang masuk ke Jepang belum tentu sesuai dengan standar Jepang, bahkan sering kali ditolak. Selain itu pula, nilai lebih produk Jepang yang ada ditambah dengan tidak dikenakannya bea masuk, menyebabkan produk Jepang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan produk lokal yakni kualitas

baik dan harga yang cukup murah. Akibatnya jelas bahwa industri lokal akan banyak yang mengalami kebangkrutan, sebagai akibat dari kekalahan dalam persaingan pasar. Untuk dapat memenuhi standar Jepang, industri Indonesia umumnya harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk membayar tenaga ahli dan teknologi yang diperlukan oleh industri, yang bahkan mayoritas dari para tenaga ahli dan teknologi tersebut berasal dari Jepang. Ini kemudian semakin memperkuat hubungan yang tidak seajar tersebut (ketergantungan atas teknologi industrial Jepang).

Jepang bisa dikatakan pula berhasil dalam membuat Indonesia tergantung kepada komoditas Jepang (impor), dan menjadikan Jepang sebagai pasar utamanya. Tabel berikut memaparkan mengenai ekspor dan impor Indonesia dengan Jepang:

Tabel 4.3 Neraca Perdagangan Indonesia-Jepang Tahun 2003-2008
(Dalam Juta Dollar AS)

Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Ekspor (Total)	13.603,5	15.962,1	18.049,1	21.732,1	23.632,8	27.743,8
Migas	6.773,2	7.578,6	8.487,4	9.533,6	10.539,9	13.948,5
Non-Migas	6.830,3	6.830,3	8.383,5	9.561,8	12.198,6	13.795,3
Impor (Total)	4.228,3	6.081,6	6.906,3	5.515,8	6.526,7	15.128,0
Migas	19,4	28,1	13,9	27,8	54,0	263,3
Non-Migas	4.208,9	6.053,5	6.892,4	5.487,9	6.472,7	14.864,7
Neraca Perdagangan	9.375,2	9.880,5	11.142,9	16.216,3	17.106,1	12.615,8
Migas	6.753,8	7.550,5	8.473,5	9.505,8	10.485,9	13.685,2
Non-Migas	2.621,4	2.330,0	2.669,4	6.710,6	6.620,2	-1.069,3

Sumber: <http://www.depdag.go.id/index.php?option=statistik&task=table&itemid=060>.
Diakses 29 Juli 2013

Jika melihat data di atas secara umum, maka dapat dikatakan bahwa hubungan perdagangan Indonesia dengan Jepang antara tahun 2003 sampai dengan 2008 menguntungkan pihak Indonesia. Hal ini disebabkan karena nilai ekspor Indonesia ke Jepang selalu lebih besar ketimbang nilai impornya dari Jepang. Dengan kata lain selama periode tersebut Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Jepang.

Akan tetapi yang menjadi permasalahannya ialah bahwa surplus perdagangan Indonesia mayoritas ditopang oleh barang-barang non-industri (barang jadi). Sebagai contohnya ialah ekspor migas. Migas itu sendiri merupakan sumber energi yang tak terbarukan, dengan artian bahwa cadangan migas yang ada (dalam perut bumi) suatu saat bisa habis dan hilang, serta tidak dapat diciptakan (diperbaharui) kembali. Selain itu pula migas merupakan unsur yang krusial bagi kehidupan masyarakat modern sekarang ini, karena migas dibutuhkan hampir dalam setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari tingkat industri sampai tingkat rumah tangga. Penjualan migas secara besar-besaran oleh Indonesia berarti pula bahwa penjualan 'aset' strategis negara. Bahkan penjualan migas ke Jepang seringkali 'mengorbankan' kepentingan domestik Indonesia, sebagai contohnya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni terjadinya fenomena kelangkaan gas di sejumlah wilayah di Indonesia.

Untuk sektor non-migas sendiri, mayoritas dari komoditas yang dijual ialah hasil alam berupa bahan mentah (raw-materials), seperti hasil tambang (yang sebagian juga merupakan energi, seperti batu-bara) dan hasil kehutanan. Produk dari Indonesia ini kemudian digunakan Jepang sebagai bahan baku ataupun sumber energi dalam menghasilkan komoditas yang lebih tinggi, dan kemudian

sebagian dijual kembali ke Indonesia. Jepang menjual produk-produk barang jadi dan alat-alat permesinan yang tentunya tidak hanya memiliki nilai teknologi yang tinggi tetapi juga nilai ekonomi yang lebih besar ketimbang komoditas yang dijual oleh Indonesia kepada Jepang.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa ODA yang disalurkan oleh JICA, baik itu berupa proyek maupun non-proyek telah memberikan dampak baik bagi pembangunan di Indonesia sehingga membuat Indonesia merasa tergantung akan keberadaan Jepang dan akan berusaha menjaga hubungan yang baik ini agar terus berlanjut dimasa-masa yang akan datang, dan untuk keberlangsungan hubungan yang baik tersebut maka Indonesia dan Jepang menandatangani *Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement* atau perjanjian ekonomi yang berbasis kemitraan, dengan harapan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan sebesar-besar dari perjanjian tersebut.